

Transformasi BUMG Maju Jaya Berbasis Modal Sosial, Gampong Peunaga Pasi, Aceh Barat

Titis Rahayu Trisnawati¹, Afrizal Tjoetra², Arfriani Maifizar³, Ikhsan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Teuku Umar

titisrahayutrisnawati@gmail.com¹, afrizaltjoetra@utu.ac.id², arfriani.maifizar@utu.ac.id³,
ikhsan.baharudin@utu.ac.id⁴

Abstract

Gampong-Owned Enterprises (BUMG) are expected to become economic institutions that lead to gampong independence through community empowerment. However, the condition of the development of BUMG is far from the government's expectations. This study aims to analyze the role of social capital in the management of BUMG Maju Jaya. This study uses a qualitative method with a case study approach. The results of this study illustrate that the success of BUMG Maju Jaya is not only determined by financial capital, but also by the strength of social capital that is integrated in three main dimensions, namely bonding social capital (internal solidarity), bridging social capital (networks between groups), and linking social capital (access to external resources). Social capital plays a key catalyst that drives active community participation, builds trust in BUMG managers, and strengthens internal and external social networks. Social capital has transformed BUMG from a mere business entity to a social-based economic institution that empowers the community. The results of this research are expected to be a reference for other BUMG managers in reviving gampong economic institutions.

Keywords: BUMG, Social Capital, Independence, Community Empowerment

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkeadilan. Desa memiliki potensi sumber daya alam dan sosial yang besar, namun sering kali belum terkelola secara optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menghadirkan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di Aceh disebut Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai instrumen kelembagaan ekonomi di tingkat desa yang diharapkan mampu mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat (Munira S. 2022).

BUMG berperan strategis sebagai motor penggerak ekonomi lokal dengan prinsip pengelolaan berbasis potensi, partisipasi, dan keberlanjutan. Melalui BUMG, masyarakat desa didorong untuk mengelola sumber daya secara kolektif guna menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat kapasitas ekonomi gampong. BUMG tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang menumbuhkan nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan kepercayaan sosial (*social trust*) dalam tata kelola ekonomi desa (Hilmawan R. 2023).

Dalam praktiknya, tidak semua BUMG mampu berkembang sesuai harapan. Banyak BUMG yang masih berstatus perintis bahkan tidak aktif akibat lemahnya manajemen, rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya inovasi dalam

pengelolaan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan BUMG tidak cukup hanya dengan pembentukan kelembagaan, melainkan perlu ditopang oleh pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan pemerintah desa yang konsisten (Munira S. 2022).

Dengan demikian, penting untuk memahami dan menegaskan kembali peran BUMG sebagai lembaga ekonomi gampong yang berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. BUMG yang dikelola dengan prinsip partisipatif, transparan, dan inovatif akan mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan gampong yang mandiri secara ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan BUMG di Kabupaten Aceh Barat belum berjalan sesuai harapan. Sebagian besar kondisinya berstatus perintis bahkan tidak berjalan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk kembali menghidupkan BUMG agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Untuk mencapai keberhasilan BUMG ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari semangat kolektif masyarakat yang ingin mandiri, serta dari kesadaran bahwa kesejahteraan tidak datang dari luar, melainkan dari kemampuan internal untuk mengelola potensi gampong secara berkelanjutan. Melalui upaya pengelolaan yang transparan dan komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat pelaksanaan BUMG dapat berjalan lebih optimal. Keberhasilan ini telah ditunjukkan oleh BUMG Maju Jaya di Gampong Peunaga Pasi, tidak hanya berhasil mengelola aset namun juga tumbuh berkembang hingga menghasilkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) yang mana dapat membawa pada kemandirian gampong. Kini, BUMG Peunaga Pasi tidak hanya sekedar menjadi lembaga ekonomi gampong, namun juga menjadi objek wisata di Kabupaten Aceh Barat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan BUMG tidak hanya ditentukan oleh modal finansial dan kelembagaan, tetapi juga oleh keberadaan modal sosial sebagai energi kolektif yang menopang keberlanjutan organisasi desa. Modal sosial mencakup jaringan kepercayaan, norma, dan nilai-nilai sosial yang mendorong kerja sama antarwarga dalam mencapai tujuan bersama (Coleman, 1988; Fukuyama, 2000). Dalam konteks BUMG, kepercayaan masyarakat terhadap pengurus, partisipasi aktif dalam musyawarah, serta solidaritas antarwarga menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan. Penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berperan besar dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa dan memperkuat tata kelola kelembagaan lokal (Nugraha and Wulandari 2018); (Rahmawati et al. 2024).

Kajian terhadap peran modal sosial dalam pengelolaan BUMG menjadi urgensi strategis karena dapat mengungkap faktor non-ekonomi yang mendukung keberhasilan lembaga ekonomi gampong. Dengan memahami bagaimana jaringan sosial, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap kinerja BUMG, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi gampong lain dalam mengembangkan model pengelolaan berbasis kepercayaan dan gotong royong. Lebih dari itu, penguatan modal

sosial di tingkat lokal juga berpotensi menciptakan tata kelola ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif; (Ramadhan and Mulyadi R 2023).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan BUMG berbasis modal sosial tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi tetapi juga menjadi arena dalam memperkuat nilai-nilai sosial yang dapat menjaga keberlanjutan lembaga BUMG. Dalam beberapa penelitian terdahulu seperti melihat perspektif modal sosial saja, dari Putnam (norma, nilai, dan kepercayaan) maupun Bourdieu (habitus, kekuasaan, dan jaringan). Silvi Yanti & Wahyu Handayani, 2023 dan Maulida, 2024 lebih berfokus pada aspek strategi pengembangan dan tata kelola BUMG. Penelitian ini mengungkap bagaimana modal sosial berfungsi sebagai penggerak transformasi BUMG dari sekadar badan usaha menjadi institusi sosial-ekonomi yang memberdayakan masyarakat. Meskipun beberapa penelitian menyebut pentingnya transparansi, penelitian ini memberikan bukti empiris yang konkret tentang bagaimana praktik kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas membangun kepercayaan masyarakat yang menjadi fondasi keberhasilan BUMG Maju Jaya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

BUMG merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi gampong yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di Provinsi Aceh, BUMG berperan sebagai penggerak ekonomi lokal yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong. BUMG dibentuk berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Haryanto, 2016).

BUMG yang telah berbadan hukum jumlahnya cukup banyak, namun yang produktif masih sangat terbatas. Di Aceh, pendiriannya diatur dalam Qanun Aceh, yang memberikan kekhasan sesuai dengan nilai-nilai dan otonomi khusus Aceh. BUMG berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya, BUMG memiliki tujuan ganda (*double bottom line*), yaitu mencari keuntungan (*profit*) sekaligus memberikan manfaat sosial (*social benefit*) bagi masyarakat gampong. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membiayai pembangunan gampong, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan BUMG tidak semata-mata berorientasi pada kapital, tetapi mengedepankan prinsip kebersamaan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial.

Modal Sosial sebagai Fondasi Transformasi BUMG

Modal sosial yang terwujud dalam jaringan kepercayaan (*trust*), norma-norma timbal balik (*reciprocity*), dan jejaring sosial (*social networks*) yang kuat menjadi fondasi sekaligus penggerak utama. Inilah yang membedakan BUMG yang sekadar ada dengan

BUMG yang benar-benar hidup dan memberi manfaat. Keberhasilan BUMG Maju Jaya tidak dapat dilepaskan dari peran modal sosial yang kuat, yang menjadi kunci transformasi dan keberlanjutannya.

Modal sosial dalam konteks ini mencakup kepercayaan (*trust*), kepercayaan masyarakat terhadap pengelola BUMG menjadi fondasi utama, terutama dalam unit usaha yang dijalankan. Partisipasi aktif, **terlihat pada** keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan dan operasional BUMG menciptakan rasa memiliki yang tinggi. Jaringan sosial (*Social Networks*), baik jaringan internal antarwarga maupun jaringan eksternal dengan pemerintah daerah dan lembaga keuangan, memperkuat akses terhadap sumber daya dan dukungan.

Konsep modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam (1993) tentang pentingnya jaringan, norma, dan kepercayaan dalam mendorong aksi kolektif, sangat relevan dengan model pengelolaan BUMG. Partisipasi aktif masyarakat ini juga sejalan dengan temuan Mardiatmoko (2018) yang menekankan bahwa partisipasi adalah indikator kunci kesuksesan BUMDes.

Tantangan dan Strategi

Meskipun memiliki dasar modal sosial namun pengelolaan BUMG Maju Jaya tetap menghadapi sejumlah tantangan, yaitu keterbatasan kapasitas manajemen, pengelola BUMG memiliki pengalaman operasional yang terbatas. Partisipasi sosial yang belum merata, hal ini dapat dilihat pada kondisi yang belum semua anggota masyarakat terlibat aktif berkontribusi dalam mendukung pengembangan BUMG. Namun, tantangan ini mampu dilalui dengan dukungan masyarakat yang kuat melalui semangat gotong royong dan kekeluargaan sehingga yang menjadi atas keterbatasan sumber daya. Kemudahan akses jaringan eksternal dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah dan lembaga keuangan memberikan akses pada pendanaan, pelatihan dan bantuan teknis.

Menurut Putnam (1993, 2000), dalam konteks BUMG Maju Jaya, keterbatasan kapasitas manajemen dapat diwujudkan melalui konsep, *Bonding Social Capital* (modal sosial yang melekat), meskipun pengelola memiliki pengalaman operasional yang terbatas, ikatan kuat antarwarga gampong menciptakan ruang untuk pembelajaran kolektif dan saling mengisi kekurangan. *Bridging Social Capital* (modal hubungan sosial), keterbatasan individu dapat diatasi melalui jaringan yang menghubungkan berbagai kelompok dalam masyarakat.

Strategi penanggulangan menurut teori Putnam dalam "Making Democracy Work" (1993) menemukan bahwa masyarakat dengan tradisi kewargaan (komunitas sipil) yang kuat cenderung lebih sukses dalam pembangunan. Sistem gotong royong dan kekeluargaan di BUMG Maju Jaya merupakan perwujudan dari norma timbal balik, kepercayaan sosial yang tinggi memungkinkan kolaborasi efektif meskipun kapasitas individu terbatas. Teori Putnam memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami bagaimana modal sosial dapat menjadi solusi efektif mengatasi keterbatasan kapasitas manajemen dan partisipasi yang belum merata dalam pengelolaan BUMG.

Peran BUMG dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong dengan mengintegrasikan tujuan sosial dan ekonomi. Berdasarkan teori sosiologi Putnam tentang modal sosial, BUMG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan jaringan sosial yang ada di gampong.

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan ekonomi melalui BUMG adalah sebagai berikut:

a. **Peningkatan Pendapatan Masyarakat**

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui BUMG dapat dilihat dari perspektif modal sosial, khususnya dalam hal *bonding social capital* yang mencakup ikatan yang kuat antarwarga di dalam gampong. Putnam (2000) menyatakan bahwa modal sosial yang terbangun dari hubungan yang saling percaya dan solidaritas di tingkat komunitas dapat menggerakkan kegiatan ekonomi yang menguntungkan seluruh anggota masyarakat. BUMG memungkinkan terciptanya kegiatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal, yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat dan memungkinkan mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya. Misalnya, melalui usaha lokal seperti pertanian, kerajinan tangan, atau wisata berbasis komunitas.

Peningkatan pendapatan ini juga diiringi dengan penguatan partisipasi sosial yang lebih inklusif, yang berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi antarwarga gampong. Sebagai contoh, dalam konteks BUMG yang berjalan dengan baik, berbagai usaha yang dijalankan dapat meningkatkan pendapatan keluarga yang lebih miskin melalui pelatihan dan pemberdayaan keterampilan.

b. **Pengurangan Angka Kemiskinan**

Dalam upaya mengurangi kemiskinan, BUMG memainkan peran strategis dengan memberdayakan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Putnam (2000) dalam teori *bridging social capital* mengungkapkan bahwa modal sosial yang terjalin tidak hanya dalam komunitas lokal, tetapi juga mencakup jaringan eksternal, seperti kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan sektor swasta. Jaringan ini memberikan akses pada sumber daya yang lebih besar dan membuka peluang usaha yang dapat mengurangi kemiskinan melalui investasi dan pendanaan.

BUMG juga membantu dalam memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang kurang beruntung, memungkinkan mereka untuk memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam ekonomi lokal. hal ini bisa mencakup pelatihan pertanian modern, kewirausahaan, atau keterampilan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pasar.

c. **Penciptaan Lapangan Kerja**

BUMG berperan dalam menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang ada di gampong. Putnam (2000) menyatakan bahwa *bonding social capital* yang kuat dapat menciptakan kepercayaan dalam komunitas untuk berkolaborasi dalam penciptaan lapangan kerja. Dalam hal ini, BUMG membantu

menyediakan berbagai jenis pekerjaan, baik dalam usaha langsung yang dijalankan oleh BUMG, maupun melalui kesempatan untuk berwirausaha yang dibantu oleh pendanaan dan pelatihan yang diberikan oleh BUMG. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.

d. **Peningkatan Keterampilan Masyarakat**

Melalui BUMG, masyarakat diberdayakan dengan keterampilan baru yang dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam berbagai bidang. Putnam (1993) dalam teorinya mengemukakan bahwa *social networks* (jejaring sosial) yang berkembang melalui partisipasi dalam kegiatan ekonomi dapat mempercepat transfer pengetahuan dan keterampilan. BUMG memberikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal dan global, seperti pengolahan hasil pertanian, manajemen usaha, dan keterampilan teknis lainnya. Dengan keterlibatan masyarakat dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMG, mereka tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga membangun rasa memiliki dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Ini menciptakan siklus positif, di mana keterampilan yang diperoleh dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

Model Pengelolaan BUMG Berbasis Kearifan Lokal

Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang berbasis pada kearifan lokal merupakan salah satu cara untuk memperkuat eksistensi dan keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh BUMG. Dalam konteks ini, *modal sosial* memainkan peranan penting dalam pemanfaatan kearifan lokal, yang mencakup penggunaan sumber daya alam, kebudayaan, dan potensi lokal lainnya.

Teori yang dikemukakan oleh Robert Putnam mengenai *social capital* (modal sosial) dapat memberikan kerangka sosiologis yang relevan untuk memahami bagaimana kearifan lokal berperan dalam pengelolaan BUMG. Putnam (1993) dalam *Making Democracy Work* menyatakan bahwa modal sosial yang terkandung dalam jaringan sosial dan norma-norma timbal balik dapat mempengaruhi pembangunan dan keberlanjutan komunitas. Dalam hal ini, BUMG yang mengadaptasi kearifan lokal akan memperkuat jaringan sosial dalam masyarakat gampong, baik yang bersifat internal antarwarga gampong maupun eksternal melalui hubungan dengan pemerintah, lembaga keuangan, atau sektor swasta.

Modal sosial ini menciptakan rasa saling percaya dan membangun hubungan yang kuat, yang pada gilirannya mendukung kolaborasi dalam menjalankan usaha yang berbasis pada potensi lokal. Kearifan lokal, yang mencakup penggunaan sumber daya alam seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, atau potensi wisata lokal, sangat penting dalam pengelolaan BUMG yang berkelanjutan. Konsep *bonding social capital* yang dikembangkan oleh Putnam (2000) mengungkapkan bahwa hubungan yang erat antarwarga di tingkat lokal memungkinkan terwujudnya aksi kolektif yang menguntungkan semua pihak.

Dengan memanfaatkan kearifan lokal, BUMG tidak hanya mengembangkan potensi yang ada tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan budaya lokal, yang sering kali lebih berkelanjutan dibandingkan dengan usaha berbasis industri besar yang lebih merusak lingkungan. Sebagai contoh, dalam beberapa BUMG yang berhasil, pemanfaatan kearifan lokal dapat berupa pengolahan produk olahan dari hasil pertanian lokal atau kerajinan tangan berbasis bahan-bahan yang mudah didapatkan di sekitar gampong. Hal ini menunjukkan bagaimana norma-norma sosial dan kepercayaan masyarakat yang dibangun melalui modal sosial dapat mendukung pengelolaan usaha yang berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa merusak potensi alam yang ada.

Putnam (2000) juga menggarisbawahi pentingnya *bridging social capital* dalam menciptakan hubungan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Dalam konteks BUMG, *bridging social capital* dapat berupa hubungan dengan kelompok eksternal, seperti mitra bisnis atau pihak-pihak yang mendukung pengembangan usaha berbasis budaya dan sumber daya lokal. Jaringan ini memperluas akses ke pasar, pengetahuan, dan sumber daya lainnya yang mendukung kelangsungan dan pengembangan usaha BUMG.

Contoh penerapan prinsip kearifan lokal dalam BUMG bisa ditemukan dalam upaya pengembangan usaha kerajinan lokal, pertanian organik, atau ekowisata berbasis masyarakat di sebuah gampong yang memanfaatkan bahan baku alami untuk produk kerajinan tangan, usaha ini tidak hanya menghasilkan produk yang bernilai tinggi di pasar, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang mengedepankan keberlanjutan. Ini sejalan dengan pandangan Putnam tentang pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Strategi Pemasaran dan Pengembangan Usaha BUMG

Untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam pemberdayaan ekonomi, sangat penting bagi BUMG untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif, baik untuk produk maupun jasa yang dihasilkan. Teori *social capital* dari Robert Putnam (1993, 2000) menawarkan kerangka untuk memahami bagaimana hubungan sosial dalam komunitas bisa dimanfaatkan dalam pengelolaan pemasaran yang lebih efektif. Pemasaran berbasis komunitas, penggunaan teknologi dalam pemasaran, serta branding dan pemasaran digital dapat mengintegrasikan aspek *social capital* dalam pengelolaan BUMG yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan.

a. Pemasaran Berbasis Komunitas dan Modal Sosial

Putnam (1993) dalam teori *social capital* menyatakan bahwa ikatan sosial yang kuat dalam suatu komunitas—baik melalui *bonding social capital* (modal sosial internal) maupun *bridging social capital* (modal sosial eksternal)—dapat menjadi pendorong utama dalam pemasaran berbasis komunitas. Dalam konteks BUMG, pemasaran berbasis komunitas dapat diwujudkan melalui pendekatan yang mengandalkan hubungan sosial antarwarga, norma timbal balik, dan jaringan yang saling mendukung. *Bonding social*

capital dalam BUMG, yang tercipta melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha, berperan dalam menciptakan kepercayaan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan.

Ketika masyarakat merasa memiliki dan terlibat dalam usaha tersebut, mereka lebih cenderung untuk mempromosikan dan mendukung produk-produk yang dihasilkan oleh BUMG. Pemasaran berbasis komunitas dalam BUMG bisa melibatkan promosi mulut ke mulut yang sangat efektif, mengingat kepercayaan yang kuat antarwarga gampong. Ini bisa mencakup upaya untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas dengan dukungan langsung dari komunitas, misalnya melalui acara bazar atau pameran yang melibatkan warga dan stakeholder terkait.

b. Pemasaran Berbasis Teknologi dan Jaringan Sosial Eksternal

Putnam (2000) juga menekankan pentingnya *bridging social capital*, yaitu hubungan antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat, dalam menciptakan kolaborasi yang efektif. Dalam hal ini, BUMG bisa memanfaatkan teknologi pemasaran digital untuk memperluas jaringan pasar dan memperkenalkan produk atau jasa mereka kepada audiens yang lebih luas. Teknologi digital memungkinkan BUMG untuk memperkenalkan produk secara online, memperluas pasar melalui platform e-commerce, media sosial, dan website. Dengan memanfaatkan *bridging social capital*, BUMG dapat menjalin kemitraan dengan pihak eksternal, seperti sektor swasta, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan, yang mendukung pemasaran dan pendanaan.

kerja sama dengan sektor swasta dan pemerintah dapat membuka peluang pasar yang lebih luas dan memperkenalkan produk BUMG ke pasar yang lebih besar. Hal ini juga meningkatkan keberlanjutan usaha melalui jaringan eksternal yang memperkuat akses terhadap berbagai sumber daya. Misalnya, BUMG dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam program-program pemberdayaan ekonomi yang melibatkan promosi produk lokal atau berkolaborasi dengan sektor swasta untuk memasarkan produk BUMG secara lebih luas.

c. Branding dan Penguatan Identitas Produk BUMG

Pentingnya branding dalam pemasaran BUMG juga dapat dijelaskan melalui teori modal sosial. Branding yang kuat menciptakan identitas yang jelas dan mudah dikenali oleh konsumen, dan ini akan lebih mudah diterima jika komunitas merasa terlibat dalam proses pengembangan dan pemasaran produk tersebut. Dengan kata lain, pemasaran BUMG tidak hanya bergantung pada promosi produk, tetapi juga pada bagaimana menciptakan sebuah identitas yang mencerminkan nilai-nilai sosial yang ada dalam komunitas, seperti gotong royong, partisipasi, dan keberlanjutan.

Pemasaran digital dan branding yang tepat akan memperkuat citra BUMG, baik di tingkat lokal maupun global. Strategi branding ini harus mempertimbangkan keunikan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh BUMG, dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam produk atau layanan yang ditawarkan. Misalnya, dalam memasarkan produk kerajinan tangan lokal atau produk pertanian organik, penting bagi BUMG untuk menunjukkan nilai keberlanjutan dan kualitas yang berakar pada tradisi dan budaya lokal.

Teori *social capital* yang dikemukakan oleh Putnam memberikan pemahaman tentang bagaimana jaringan sosial, kepercayaan, dan norma-norma timbal balik dapat meningkatkan efektivitas pemasaran dalam BUMG. *Bonding social capital* memperkuat dukungan komunitas terhadap produk BUMG, sedangkan *bridging social capital* memungkinkan BUMG untuk memperluas jaringan dan mengakses pasar yang lebih luas. Melalui penggunaan teknologi dan pemasaran berbasis digital, BUMG dapat mengoptimalkan potensi jaringan sosial yang ada untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih besar dan lebih beragam.

Teori Putnam tentang modal sosial sangat relevan dalam memahami bagaimana BUMG dapat merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif. Modal sosial, baik yang bersifat internal (*bonding*) maupun eksternal (*bridging*), menjadi dasar utama untuk memperkuat kepercayaan dan kolaborasi dalam pemasaran produk. Dengan memanfaatkan pemasaran berbasis komunitas, teknologi digital, dan branding yang kuat, BUMG dapat meningkatkan eksistensinya, memperluas pasar, dan memperkuat keberlanjutan usaha berbasis kearifan lokal.

Studi Kasus Keberhasilan dan Kegagalan BUMG di Aceh

a. Keberhasilan BUMG, Modal Sosial sebagai Kunci

BUMG yang berhasil di Aceh sering kali didorong oleh kuatnya *bonding social capital*, di mana kepercayaan dan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan BUMG memperkuat solidaritas dan kolaborasi antarwarga. Ketika warga gampong merasa memiliki usaha yang dikelola oleh BUMG, mereka lebih cenderung untuk mendukung dan berkontribusi pada keberhasilan usaha tersebut. Misalnya, dalam kasus BUMG yang berhasil dalam pengelolaan kerajinan tangan atau produk pertanian lokal, partisipasi aktif warga dalam tahap produksi, pemasaran, dan distribusi dapat mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal dan memperkuat kepercayaan antarwarga.

Teori Putnam menyatakan bahwa *bonding social capital* ini mengarah pada pembentukan komunitas yang solid dan dapat saling mendukung dalam menghadapi tantangan. BUMG yang sukses memanfaatkan kepercayaan ini untuk menjaga keberlanjutan usaha, karena masyarakat terlibat dalam setiap tahap dan merasa bertanggung jawab atas hasilnya. Salah satu contoh keberhasilan adalah BUMG yang mengembangkan usaha kerajinan lokal yang mendapatkan dukungan kuat dari komunitas melalui promosi mulut ke mulut, sehingga produk tersebut dikenal luas dan berhasil dipasarkan.

b. Kegagalan BUMG karena Keterbatasan Modal Sosial

Faktor determinan yang mempengaruhi keberlanjutan BUMG di Aceh Barat, yaitu, faktor profesionalitas pengurus BUMG, faktor kondisi lingkungan, dan faktor partisipasi masyarakat (Arfrizal Tjoetra et al. 2024). Berdasarkan penelitian tersebut maka ditemukan sebagian besar BUMG di Aceh Barat mengalami kendala dalam pengelolaannya. Beberapa BUMG gagal karena terbatasnya *social capital*, baik dalam bentuk *bonding* maupun *bridging*.

Kegagalan sering kali terjadi karena kurangnya kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMG, yang berdampak pada rendahnya partisipasi dalam operasional dan pengambilan keputusan. Kurangnya *bridging social capital* juga menghambat hubungan dengan pihak eksternal yang bisa menyediakan dukungan teknis, pendanaan, atau pasar yang lebih luas. Putnam (2000) menyebutkan bahwa *bridging social capital* penting untuk membuka akses ke sumber daya luar yang dapat membantu usaha BUMG berkembang. Kegagalan dalam mengembangkan hubungan dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dapat menyebabkan terbatasnya kesempatan pendanaan dan pelatihan yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas manajerial BUMG.

Selain itu, ketidakmampuan untuk memperluas jaringan eksternal juga membatasi kemampuan BUMG untuk mengakses pasar yang lebih besar, yang berpotensi menurunkan daya saing produk atau jasa yang ditawarkan. Contoh kegagalan BUMG dapat ditemukan pada usaha yang tidak berhasil mengelola keterlibatan masyarakat dengan baik atau yang kurang mampu membangun hubungan yang kuat dengan mitra eksternal. Misalnya, beberapa BUMG yang berfokus pada sektor pertanian atau kerajinan tangan gagal bertahan karena rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan usaha dan kurangnya dukungan dari pihak luar, seperti pemerintah atau lembaga keuangan.

Keberlanjutan dan Inovasi dalam BUMG

Keberlanjutan dan inovasi merupakan faktor kunci bagi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk bertahan dalam jangka panjang dan beradaptasi dengan perubahan global yang cepat, seperti perubahan iklim atau kemajuan teknologi yang pesat (Safitri et al. 2021). Dalam konteks ini, teori modal sosial Robert Putnam memberikan pandangan yang relevan untuk memahami bagaimana BUMG dapat memanfaatkan jaringan sosial dan norma-norma kolektif untuk menciptakan keberlanjutan dan inovasi.

Putnam (1993, 2000) menekankan bahwa modal sosial baik *bonding* maupun *bridging social capital* merupakan dasar yang penting untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi dalam suatu komunitas. Modal sosial ini dapat mendukung BUMG dalam merancang strategi keberlanjutan dan inovasi yang efektif, baik dalam pengelolaan sumber daya alam, produk, maupun teknologi. Keberlanjutan BUMG tidak hanya bergantung pada aspek finansial, tetapi juga pada kelestarian sosial dan lingkungan yang diusahakan melalui pengelolaan yang berbasis pada modal sosial.

Putnam (2000) dalam *Bowling Alone* mengemukakan bahwa *bonding social capital*, yaitu hubungan yang erat antar anggota komunitas, sangat penting dalam memastikan keberlanjutan usaha yang bersifat kolektif. Dalam konteks BUMG, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan usaha memberikan dasar yang kokoh untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan. Ketika anggota komunitas merasa memiliki dan terlibat dalam pengelolaan BUMG, mereka cenderung mendukung kelanjutan usaha tersebut.

Selain itu, *bridging social capital* juga berperan dalam memperluas jaringan dan akses ke sumber daya eksternal. Melalui jaringan eksternal, BUMG dapat memperoleh informasi terbaru tentang teknologi baru, inovasi pasar, atau tren global seperti keberlanjutan lingkungan atau pengelolaan sumber daya alam yang efisien. Jaringan eksternal ini dapat mencakup hubungan dengan pemerintah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, atau bahkan akademisi yang dapat memberikan pengetahuan, pelatihan, dan akses pada teknologi terbaru.

Inovasi dalam produk dan sistem manajemen BUMG dapat dijalankan dengan memanfaatkan modal sosial yang terjalin dalam komunitas dan hubungan eksternal. Dalam teori Putnam, *social capital* berfungsi sebagai penggerak bagi masyarakat untuk menciptakan dan menyebarkan ide-ide baru dalam menghadapi tantangan yang ada. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam BUMG, terciptalah ruang untuk inovasi sosial yang melibatkan ide-ide lokal yang diterima dan didukung oleh komunitas.

Misalnya, dalam hal inovasi produk, BUMG dapat mengembangkan produk baru yang memanfaatkan sumber daya alam lokal, namun dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, misalnya produk berbasis pertanian organik atau produk kerajinan tangan yang menggunakan bahan baku ramah lingkungan.

Di sisi lain, inovasi dalam sistem manajemen BUMG juga dapat mencakup penggunaan teknologi dalam pengelolaan operasional dan distribusi produk, seperti penerapan sistem informasi manajemen yang memungkinkan pengelolaan usaha lebih efisien dan transparan. Pentingnya inovasi dalam manajemen ini didukung oleh *bridging social capital* yang mempertemukan BUMG dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam teknologi dan manajemen modern. Dengan demikian, BUMG dapat memperkenalkan inovasi yang tidak hanya relevan dengan pasar lokal, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tren global.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh BUMG adalah bagaimana menghadapi perubahan iklim dan kemajuan teknologi yang cepat. Putnam (1993) dalam *Making Democracy Work* berpendapat bahwa komunitas yang memiliki modal sosial yang kuat akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan besar yang terjadi di lingkungan eksternal. Dalam konteks BUMG, inovasi sosial menjadi penting untuk menciptakan solusi yang berbasis pada komunitas, seperti mengembangkan sistem pertanian yang ramah lingkungan, atau produk-produk yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Melalui *bonding social capital*, komunitas gampong dapat bekerja bersama untuk mengembangkan solusi berbasis kearifan lokal yang sesuai dengan tantangan global. Misalnya, dalam menghadapi perubahan iklim, BUMG dapat mengadopsi teknik pertanian yang lebih ramah lingkungan, seperti pertanian organik atau agroforestry, yang dapat meningkatkan ketahanan pangan sambil menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Ini juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang ditanamkan dalam komunitas, di mana masyarakat memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.

Sementara itu, *bridging social capital* memungkinkan BUMG untuk memperoleh informasi dan teknologi terbaru dari luar komunitas yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Misalnya, dengan bermitrakan pemerintah atau lembaga swasta, BUMG dapat mengakses teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka atau mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan dan dapat diterima oleh pasar global.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami fenomena yang terjadi pada BUMG Maju Jaya Gampong Peunaga Pasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam makna dan pengalaman yang ada dalam konteks yang spesifik. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang holistik dan mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan BUMG dalam konteks yang diteliti.

Dalam kerangka pendekatan kualitatif ini, penentuan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan aktor-aktor kunci yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan dinamika BUMG Maju Jaya, seperti pengurus BUMG, aparatur gampong, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha yang bermitra dengan BUMG. Pemilihan informan ini bertujuan untuk menangkap relasi sosial, pola kepercayaan, norma bersama, serta jaringan sosial yang berkembang dalam pengelolaan BUMG. Modal sosial dipahami sebagai sumber daya sosial yang berperan penting dalam mendorong transformasi kelembagaan dan keberlanjutan usaha BUMG di tingkat gampong.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Maju Jaya di Peunaga Pasi Aceh Barat, mengungkap temuan signifikan tentang transformasi BUMG dengan pengelolaan berbasis modal sosial sebagai keberhasilan usaha kolektif. Berdasarkan analisis kerangka teoritis *Bonding, Bridging, dan Linking Social Capital*, penelitian ini membuktikan bahwa solidaritas komunitas tidak cukup tanpa diimbangi dengan jejaring strategis eksternal.

Bonding Social Capital

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekuatan *bonding social capital* menjadi tulang punggung awal pengembangan BUMG Maju Jaya. Kepercayaan (*trust*) yang tinggi antarwarga Gampong Peunaga Pasi terwujud dalam partisipasi aktif dalam setiap tahapan pengembangan BUMG. Membangun kebersamaan bukan hal yang mudah di tengah tantangan perubahan sosial nilai kebersamaan mulai memudar. Namun kekuatan hubungan internal yang terjalin dengan kekerabatan telah menjadi budaya di Gampong Peunaga Pasi dan diteruskan dari generasi ke generasi. Gotong royong pembangunan

fasilitas usaha, kepatuhan terhadap norma adat dan nilai-nilai keislaman yang mendorong lahirnya integritas kolektif.

Persoalan paling mencolok yang saat ini terjadi adalah mulai hilangnya nilai-nilai kegotongroyongan dan kebersamaan. Kondisi pada masyarakat sekarang, nilai-nilai itu menjadi pudar. Namun, di Peunaga Pasi masih ditemukan adanya solidaritas yang kuat. Kekuatan *bonding social capital* pada BUMG Maju Jaya terwujud melalui hubungan sosial yang erat antaranggota masyarakat, hubungan terjalin didasarkan pada nilai kepercayaan, solidaritas, dan rasa kebersamaan. Mekanisme musyawarah yang dijalankan dalam setiap proses pengambilan keputusan menjadi wadah partisipasi kolektif yang memperkuat kohesi sosial dan legitimasi organisasi. Selain itu, budaya gotong royong yang masih terpelihara secara konsisten berperan sebagai instrumen sosial dalam memperkuat ikatan horizontal antarwarga, meningkatkan efektivitas kerja sama, serta membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan kegiatan ekonomi dan sosial BUMG.

Adanya nilai kebersamaan ini tergambaran secara jelas dari pernyataan Wahidah selaku Direktur BUMG sebagai berikut bahwa BUMG ini didirikan tahun 2017 melalui proses musyawarah. Pemilihan direktur BUMG juga dilakukan melalui musyawarah, dan saya terpilih menjadi direktur dari hasil musyawarah itu. Dukungan masyarakat sangat berperan dalam pendirian BUMG. Bahkan pada permulaan pembangunan kolam pemandian warga gamponglah yang membangunnya secara bersama-sama. Dan kami memastikan semua peluang kerja bagi warga setempat. Hal yang sama juga disampaikan Noni sebagai masyarakat, yang selalu mendapatkan undangan pada setiap kegiatan rapat-rapat gampong. Noni juga mengatakan bahwa masyarakat juga diundang, kalau untuk kehadiran kadang ada yang hadir ada juga yang tidak, bahkan kalau tidak hadir mungkin karena kerja diluar atau masih di sawah.

Noni juga menyampaikan bahwa kemudahan dalam menyampaikan pendapat baik itu dalam rapat ataupun di luar rapat secara langsung menambahkan kepercayaan masyarakat kepada keuchik. Budaya musyawarah masih menjadi cara dalam menyampaikan pendapat dan menyelesaikan persoalan di Gampong Peunaga Pasi. Sarinah selaku bendahara BUMG menyampaikan dalam wawancara tentang keterlibatan masyarakat berupa gotong royong menjalankan BUMG Maju Jaya. Peluang kerja juga terbuka untuk siapa saja, misalnya ada permintaan sewa tenda dan sound sistem kami menyediakan mobil angkutan dan menyampaikan kepada warga gampong siapa yang bersedia mengantar dan memasang alat tenda akan dibayar secara langsung, jadi siapa saja boleh membantu. Begitu juga untuk penjaga kolam setiap sabtu minggu kami susun secara bergiliran agar semua warga usia 19 – 45 Tahun bisa mendapatkan kesempatan yang sama”.

Bridging Social Capital

Penghubung kelompok heterogen, temuan krusial menunjukkan bahwa BUMG Maju Jaya berhasil membangun *bridging social capital*, melalui harmonisasi antar

kelompok sosial dalam gampong, kolaborasi antara suku Aceh dan Padang dalam pengelolaan usaha. Kemampuan keuchik sebagai pimpinan gampong dalam menjaga hubungan antarwarga merupakan bentuk strategi kepemimpinan yang berhasil diterapkan (Maifizar et al. 2024).

Integrasi peran pemerintah gampong dan pengelola BUMG dalam menjaga hubungan dengan tokoh adat, dan pemuda melalui musyawarah telah menyatukan lintas kelompok dalam satu tujuan yaitu mengutamakan kepentingan bersama. *Bridging capital* inilah yang menjadi jembatan menghubungkan berbagai kepentingan dan potensi dalam komunitas, menciptakan sinergi yang lebih produktif. BUMG Maju Jaya merepresentasikan bentuk modal sosial yang berfungsi menjembatani hubungan antar kelompok sosial yang berbeda dalam masyarakat Gampong Peunaga Pasi, serta memperluas jaringan kolaboratif dengan semua pihak baik internal maupun eksternal. *Bridging social capital* menjadi instrumen strategis dalam menghubungkan komunitas lokal dengan kelompok lain yang lebih heterogen untuk memperluas peluang dan sumber daya.

Dalam konteks modal sosial, BUMG Maju Jaya menjadi penghubung pada kemitraan aktif dengan berbagai aktor di luar gampong, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Barat, Baitul Mal Aceh, serta lembaga keuangan dan swasta. Kolaborasi lintas sektor tersebut tidak hanya memberikan legitimasi terhadap eksistensi BUMG, tetapi juga membuka akses terhadap sumber daya ekonomi, pelatihan manajerial, dan peluang ekspansi usaha. Berdasarkan kerangka teori Robert D. Putnam, relasi lintas kelompok ini merupakan bentuk nyata dari *bridging social capital* yang menumbuhkan toleransi sosial, memperluas informasi, dan memperkuat daya adaptasi komunitas terhadap perubahan.

Linking Social Capital

Akses terhadap sumber daya eksternal merupakan temuan paling strategis dalam penelitian ini yaitu penguasaan *linking social capital* oleh pengelola BUMG. Keuchik dan direktur BUMG secara proaktif membangun hubungan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Baitul Mal Aceh sebagai sumber pendanaan, Kementerian dan institusi pemerintah tingkat nasional sebagai pendamping peningkatan kompetensi, dan mitra swasta sebagai upaya pengembangan dan adaptif dalam pengelolaan.

Hubungan yang baik terjalin melalui kepatuhan administrasi dan menghadiri pertemuan dalam forum-forum eksternal. Kesempatan ini mereka manfaatkan sebagai ajang peningkatan kapasitas dan juga sarana publikasi langsung BUMG Maju Jaya. *Linking social capital* dalam konteks BUMG Maju Jaya merupakan bentuk hubungan vertikal yang menghubungkan masyarakat gampong dengan aktor eksternal yang memiliki kekuasaan, sumber daya, dan legitimasi yang lebih tinggi. Berbeda dengan *bonding* yang memperkuat solidaritas internal, serta *bridging* yang menghubungkan lintas kelompok sosial secara horizontal, *linking social capital* berperan strategis dalam

membuka akses menuju sumber daya eksternal dan memperluas kapasitas kelembagaan ekonomi gampong.

Dalam penelitian ini, kekuatan *linking social capital* BUMG Maju Jaya tampak melalui kemampuan kepemimpinan Keuchik dan Direktur BUMG dalam menjalin relasi institusional dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan organisasi strategis lain. Hubungan yang dibangun bukan hanya bersifat administratif, melainkan relasi kepercayaan dan profesionalisme yang mencerminkan kredibilitas BUMG di mata pihak eksternal. Melalui kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) dan Baitul Mal Aceh telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas pengelola melalui pelatihan manajerial dan dukungan modal usaha.

Selain itu, keterlibatan BUMG dalam forum-forum koordinasi tingkat kabupaten maupun provinsi memperkuat posisi tawar gampong dalam jejaring pembangunan daerah.

Menurut perspektif Pierre Bourdieu, *linking social capital* berfungsi sebagai modal strategis yang dapat dikonversi menjadi bentuk modal lain, seperti modal ekonomi, budaya, dan simbolik. Dalam hal ini, jaringan vertikal yang dimiliki pengelola BUMG Maju Jaya telah memberikan keuntungan ekonomi berupa kemudahan akses permodalan dan bantuan usaha produktif, sekaligus meningkatkan modal simbolik melalui pengakuan pemerintah terhadap keberhasilan BUMG sebagai model praktik baik di Aceh Barat.

Legitimasi tersebut memperkuat kepercayaan publik dan membuka peluang kerja sama baru lintas sektor. Lebih jauh lagi, *linking social capital* berperan dalam memperkuat tata kelola BUMG berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hubungan yang baik dengan lembaga eksternal mendorong pengelola untuk menjaga standar pelaporan keuangan, mengelola aset secara profesional, dan memastikan setiap program memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam kerangka teori Robert D. Putnam, *linking social capital* yang kuat memungkinkan integrasi antara jaringan lokal dengan struktur institusi makro. Artinya, BUMG Maju Jaya tidak lagi beroperasi secara terisolasi sebagai entitas ekonomi desa, melainkan telah menjadi simpul penghubung antara masyarakat gampong dengan sistem ekonomi yang lebih luas. Kekuatan ini menjadikan BUMG Maju Jaya mampu beradaptasi terhadap dinamika kebijakan, memperoleh legitimasi dari aktor eksternal, dan meningkatkan kapasitas kolektif masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Gotong Royong Merajut Visi

Proses pendirian BUMG Maju Jaya bermula dari musyawarah gampong. Di balai pertemuan, para tetua adat, geuchik, pemuda, dan perwakilan ibu-ibu duduk bersama. Mereka tidak hanya membahas pendirian BUMG sebagai kewajiban administratif, tetapi merumuskan cita-cita kolektif. Kepercayaan (*trust*) kepada pengelola yang ditunjuk dibangun secara transparan. Mereka percaya karena yang dipilih adalah orang-orang yang dikenal integritasnya, bukan karena latar belakang politik atau kekayaan. Modal sosial

berupa jejaring kekerabatan dan bertetangga (*social networks*) memastikan bahwa informasi tentang BUMG tersebar merata, meminimalisir miskomunikasi dan menumbuhkan rasa kepemilikan bersama.

BUMG yang bergerak di bidang wisata perlu memiliki kekuatan norma timbal balik dan terlihat nyata oleh masyarakat. Kolam pemandian membuka peluang kerja dengan pemberian gaji yang wajar, dengan bergerak dalam lingkup BUMG mereka merasa berkontribusi dan keuntungan yang diperoleh BUMG akan kembali kepada mereka, baik dalam bentuk bagi hasil, perbaikan infrastruktur, bantuan sosial atau beasiswa untuk anak-anak mereka. Ketika mesin air kolam rusak, para pemuda dengan sigap bergotong royong memperbaikinya. Ibu-ibu membantu dalam pengawasan pemakaian. Ini adalah wujud dari aksi kolektif (*collective action*) yang dimungkinkan oleh tingginya modal sosial. Mereka tidak menunggu upah, karena mereka memandang BUMG sebagai milik bersama yang harus dijaga.

5. PENUTUP

Pengembangan usaha kolektif ini bertumpu pada optimalisasi modal sosial sebagai fondasi strategis. Penelitian ini membuktikan bahwa kemajuan BUMG tidak semata-mata ditentukan oleh modal finansial, melainkan oleh kekuatan tiga dimensi modal sosial yang terintegrasi secara sinergis.

Pertama, modal sosial berperan sebagai katalisator utama dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Kepercayaan (*trust*) yang terbangun antara masyarakat dengan pengelola BUMG menciptakan landasan kokoh untuk kolaborasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan mulai dari musyawarah perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan kegiatan gotong royong menunjukkan tingginya rasa kepemilikan bersama. Transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan menjadi kunci dalam memelihara kepercayaan ini, sekaligus mencegah potensi konflik yang dapat menggerus solidaritas komunitas.

Kedua, jaringan sosial yang terbentuk secara internal dan eksternal memperkuat daya tahan BUMG. Jaringan internal yang ditopang oleh nilai-nilai kearifan lokal dan budaya musyawarah menciptakan kohesivitas sosial, sementara jaringan eksternal dengan pemerintah daerah, institusi keuangan, dan mitra strategis lainnya membuka akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Kombinasi antara bonding social capital (solidaritas internal) dan linking social capital (jaringan kekuasaan eksternal) ini menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan BUMG.

Ketiga, penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan BUMG melalui pendekatan berbasis modal sosial terbukti mampu mengatasi permasalahan keterbatasan geografis dan ekonomi yang sering menjadi tantangan bagi desa-desa di Indonesia. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program pemerintah dengan menggunakan dana otonomi daerah melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan. Namun kurangnya rancangan besar di awal program dan kekosongan hukum telah mengakibatkan anggaran yang minim manfaat di sektor ini. (Ikhsan et al. 2025) Untuk itu dibutuhkan adanya

kemandirian gampong dalam memenuhi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan melalui optimalisasi BUMG.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, Rafi. 2023. "Modal Sosial Sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Socius* 10(1):41–51. doi: <https://doi.org/10.24036/scs.v10i1.378>.
- Arfrizal Tjoetra, Agatha Debby Reiza Macella, Basri, and Yuhdi Fahrimal. 2024. *Strategi Penguatan Badan Usaha Milik Gampong Untuk Pemberdayaan Masyarakat Mneju Ekonomi Berkelanjutan*. Meulaboh.
- E, Suharto. 2021. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Teori Dan Praktik Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Hilmawan R. 2023. "Pembangunan Pedesaan Dari Dana Desa, Badan Usaha Milik Desa." *ScienceDirect*.
- Ikhsan, Vellayati Hajad, Nodi Marefanda, Akmal Saputra, and Herizal. 2025. "Dana Otonomi Khusus Bukan Untuk Pengentasan Kemiskinan: Pelajaran Dari Jalan Aceh." *Journal of Local Geverment Issue* 5(2):161–75. doi: <https://doi.org/10.22219/logos.v8i2.41879>.
- Maifizar, Arfriani, Lili Marlina, Sari Maulida Vonna, and Irwan Abdullah. 2024. "Peran Aparatur Gampong Dalam Menangani Konflik Sosial Masyarakat Di Gampong Peunaga Cut Ujung Aceh Barat." *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena* 04(02):93–100.
- Maulida Maulida. 2024. "Tata Kelola BUMG Di Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen." Universitas Malikusaleh, Banda Aceh.
- Munira S. 2022. "Standarisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik ... (BUMG)." *Repositori Universitas Ar-Raniry*.
- Nugraha, A., and D. Wulandari. 2018. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa." *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 9(2):101–12.
- Rahmawati, R., G. Prayitno, N. Firdausiyah, D. Dinanti, and D. .. Adrianto. 2024. *Modal Sosial Dan Kualitas Hidup Di Desa Wisata Pedesaan Indonesia*.
- Ramadhan, F., and Mulyadi R. 2023. "Modal Sosial Sebagai Fondasi Tata Kelola Desa Yang Berkelanjutan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia* 7(1):44–58.
- Safitri, Irma, Nila Trisna, Ikhsan Ikhsan, and Vellayati Hajad. 2021. "ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT." *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 5(2):39–47. doi: [10.22437/jisipunja.v5i2.14521](https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i2.14521).

Silvi Yanti, Fitri, and Sri Wahyu Handayani. 2023. "Strategi Pengembangan BUMG Dalam Meningkatkan Pendapatan Gampong Pasar Aceh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat." *Journal of Economics, Bussiness and Management Issues* 1(1):26–37. doi: 10.47134/jebmi.v1i1.68.

Zulfadhl, and Khairulyadi. 2021. "Modal Sosial Dalam Pengelolaan BUMG Di Gampong Trieng Gadeng Aceh Timur." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 2(No.2):60–74.